

## ABSTRAK

Peningkatan arus investasi internasional menuntut negara memiliki sistem pengelolaan aset dan investasi yang profesional dan berdaya saing, yang di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai *Superholding* dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Namun, dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait efektivitas tata kelola, kesesuaian dengan *Santiago Principles*, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan *Indonesia Investment Authority* (INA), sehingga diperlukan kajian komparatif dengan lembaga pengelola investasi di Singapura melalui *Temasek Holdings* dan *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan spesifikasi doktrinal, dengan data berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis komparatif dan analisis isi untuk mengkaji struktur kelembagaan serta mekanisme pengelolaan investasi negara oleh *Superholding* dan SWF di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPI Danantara secara normatif telah memiliki dasar hukum dan struktur kelembagaan yang memadai serta tidak terdapat tumpang tindih pengelolaan investasi dengan INA, namun pengelolaannya masih bersifat *regulatory driven* dan berorientasi pada aspek domestik, berbeda dengan Singapura melalui *Temasek Holdings* dan *GIC* yang lebih profesional serta sesuai dengan *global best practices* dan *Santiago Principles*, khususnya dalam aspek pengelolaan investasi dan aset serta tata kelola internal lembaga.

**Kata Kunci:** BPI Danantara, *Superholding*, *Sovereign Wealth Fund*, *Temasek Holdings*, *Government of Singapore Investment Corporation*.